

## PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PHI/2022/PN.MDO)

Martin Pasaribu<sup>1</sup> dan Ari Hernawan<sup>2</sup>

### INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang memperoleh upah di bawah upah standar minimum dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang memperoleh upah di bawah upah standar minimum, keduanya ditinjau berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdo.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber dari akademisi dan juga Dinas Ketenagakerjaan dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan pertama, berupa perlindungan hukum preventif dan kedua, perlindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif yang dimaksud dapat dilihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88, 89, 90 dan 91 serta dan PP Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Pelindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada Sandra Polil dapat dilihat pada Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Upaya hukum yang dapat dilakukan Sandra Polil yaitu melalui jalur di luar pengadilan dan juga melalui jalur pengadilan. Jalur di luar pengadilan yang digunakan, dapat melalui perundingan bipartit yang kemudian apabila gagal dilanjutkan dengan mediasi. Dalam hal ini, apabila kedua cara melalui jalur di luar pengadilan gagal, dilanjutkan dengan cara melalui jalur pengadilan. Jalur pengadilan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap Widdhi Bodhi, sebagai pemilik Toko Sahabat Swalayan dengan dasar gugatan, yaitu menggugat pihak tersebut untuk membayar sisa upah yang belum dibayarkan kepada Sandra Polil.

Kata Kunci:

Pelindungan Hukum, Pekerja, Upah Minimum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS WHO EARNER WAGES BELOW  
THE MINIMUM STANDARD  
(CASE STUDY DECISION NUMBER 4/PDT.SUS-PHI/2022/PN.MDO)

Martin Pasaribu<sup>1</sup> and Ari Hernawan<sup>2</sup>

ABSTRACT

Another aim of this research is to find out and analyze legal protection for workers who earn wages below the minimum standard wage. To find out and analyze legal remedies that can be taken by workers who earn wages below the minimum standard wage, both base on the case in Decision Number 4/Pdt. Sus-PHI/2022/PN.Mdo.

This research uses normative juridical research with the nature of the research being descriptive. This research was carried out by means of library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials using tools in the form of document study. This research was also carried out by conducting interviews with sources from academics and also the Employment Service using tools in the form of interview guides. The research results were analyzed qualitatively and presented descriptively.

This research concludes firstly, in the form of preventive legal protection and secondly, repressive legal protection. The preventive legal protection referred to can be see in Employment Law Number 13 of 2003 Articles 88, 89, 90 and 91 and Wage Regulation Number 36 of 2021 Article 5 paragraph (1) and Article 6 paragraph (1).

The repressive legal protection that can be given to Sandra Polil can be seen in Article 185 of the Employment Law Number 13 of 2003. The legal efforts that Sandra Polil can take are through out-of-court channels and also through court. The out-of-court route used can be through bipartite negotiations and then if that fails, proceed with mediation. In this case, if the method outside the court fails, proceed with the court route. The court route in question can be carried out by filling a lawsuit against Widdhi Bodhi, as the owner of the Sahabat Swalayan Shop with the basis of the lawsuit, namely suing the party to pay the remaining wages that have not been paid to Sandra Polil.

Keywords:

Legal Protection, Workers, Minimum Wage.

---

<sup>1</sup> Postgraduate Student of Bussines Law in Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Lecture Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.